



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapiusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 103-10-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Partai Persatuan Pembangunan (Perbaikan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN	PIHAK TERKAIT
NOMOR	103.10.01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 10.18 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapiusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapiusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di **Provinsi Aceh** pada **Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2** untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.
15. FERNANDY RUSDI, S.H.
16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ALVON K. PALMA, S.H.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 21. APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 37. MEGAWATY, S.H. |
| 22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H. |
| 23. RIZKA, S.H. | 39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH. |
| 24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H. |
| 25. M. IBNU, S.H. | 41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 26. SAMUEL DAVID, S.H. | 42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | 43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H. | 44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si. | 45. ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 30. FARIDA HANUM, S.H. | 46. HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 31. RIDWAN DARMAWAN, S.H. | 47. MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 48. ASTIRUDDIN PURBA, SH. |
| 33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. | 49. RONNY TALAPESSY, SH. MH. |
| 34. BENNY HUTABARAT, S.H. | 50. ELIEZER MURAFER. SH. |
| 35. I MADE SUKA ARTHA, S.H. | 51. KODRAT EFENDI, SH., MH. |
| 36. HARLI MUIN, SH., MA., MT. | 52. YULIWATI, SH. |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 103-10-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

PROVINSI ACEH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGAH DAPIL ACEH TENGAH 2

A. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Melewati Tenggang Waktu

- a. Bahwa permohonan Pemohon untuk Provinsi Aceh, yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB, adalah perselisihan perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) **Kota Sabang Dapil Sabang 1** dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) **Kabupaten Aceh Besar Dapil Aceh Besar 5**.
- b. Bahwa didalam permohonan tersebut, sama sekali tidak mempersoalkan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) **Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2**.

- c. Bahwa Pemohon, baru mengajukan Perselisihan Hasil Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) **Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2** pada Perbaikan Permohonan yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 22.04 WIB.
- d. Bahwa permohonan pemohon terkait Dapil Aceh Tengah 2 haruslah dianggap permohonan yang baru, sehingga tidak bisa dianggap bagian dari perbaikan permohonan yang telah diajukan sebelumnya, karena terdapat perbedaan substansi persoalan antara Dapil Kota Sabang 1, Dapil Aceh Besar 5 dengan Dapil Aceh Tengah 2, dimana masing-masing dapil tersebut adalah untuk pengisian keanggotaan DPRK pada daerah yang berbeda dan juga pihak terkaitnya juga berbeda.
- e. Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRK Dapil Aceh Tengah 2, menurut Pihak Terkait haruslah dianggap baru diajukan pada tanggal 30 Mei 2019, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, permohonan yang demikian telah melewati tenggang waktu yang dibenarkan, sehingga sudah sepatutnya permohonan aquo dinyatakan telah melewati tenggang waktu.

2. Permohonan Pemohon Cacat Formil

- a. Bahwa berdasarkan pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 9 huruf b angka 4 menyebutkan bahwa permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- c. Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon beserta dengan alasan-alasannya sehingga mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2.

- d. Bahwa ketiadaan penjelasan terkait perbedaan perolehan suara sebagaimana disebut diatas, mengakibatkan permohonan pemohon cacat secara formil, sehingga menurut pihak terkait sangat beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

3. Permohonan Pemohon Kabur

- a. Bahwa didalam Petitum Permohonan Pemohon angka 3 halaman 25, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut, tanpa menyebutkan angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Bahwa pada Petitum angka 3.1.3 tertulis Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPRK) untuk pengisian anggota DPRK, dan dibawahnya tertulis pemohon partai persatuan pembangunan calon anggota DPRK, Dapil 2 Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut, namun didalam tabel yang ditampilkan sama sekali tidak menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon, namun tabel yang ditampilkan hanya berkaitan dengan data pemilih.
- c. Bahwa ketidakjelasan petitum yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Permohonan Pemohon telah gugur

- a. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 09 Juli 2019, dengan agenda pembacaan Permohonan, secara tegas kuasa hukum pemohon menyampaikan bahwa khusus untuk permohonan Dapil Aceh Tengah 2 untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Tengah, tidak bersedia untuk menyampaikan atau membaca permohonan di dalam persidangan tersebut, baik untuk posita maupun petitum permohonan.
- b. Bahwa menurut Pihak Terkait, ketidaksediaan kuasa hukum pemohon untuk menyampaikan/membacakan permohonan tersebut didalam persidangan, haruslah dianggap sebagai bentuk ketidak hadiran Pemohon dalam persidangan khusus untuk perkara aquo.
- c. Bahwa dengan tidak hadirnya pemohon/kuasa hukum pemohon dalam perkara aquo, menurut pihak terkait, permohonan pemohon haruslah dianggap telah gugur.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.
2. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, baik untuk pemohon maupun pihak terkait untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Tengah Dapil 2 telah sesuai dengan hasil perhitungan pihak terkait, sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	5.654
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.733

3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa adanya perbedaan pencatatan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih pada TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq Kecamatan Linge, berkaitan dengan hal tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa perbedaan pencatatan pengguna hak pilih di Kedua TPS tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara dan tidak ada pihak yang dirugikan, dimana terkait dengan kekeliruan tersebut merupakan kesalahan teknis, yang kemudian telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan
 - 3.2 Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di kedua TPS tersebut saksi-saksi partai politik dan Pengawas TPS sama sekali tidak ada mengajukan keberatan.
 - 3.3 Bahwa pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Linge telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq, dimana dari hasil penghitungan suara ulang tersebut tidak ada perubahan perolehan suara sebagaimana yang telah dituliskan dalam dokumen Form C1-DPRK.
4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada halaman 23 yang menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara pada dokumen C1 dengan Dokumen DAA1 di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana perolehan suara di 4 kecamatan tersebut untuk Pemohon dan pihak terkait dalah sebagai berikut:

4.1 Tabel Perolehan Suara Kecamatan Linge

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		
		C1	DAA1	DA1
3	PDI Perjuangan	1.090	1.090	1.090
10	Partai Persatuan Pembangunan	959	959	959

4.1 Tabel Perolehan Suara Kecamatan Pegasing

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		
		C1	DAA1	DA1
3	PDI Perjuangan	2.124	2.124	2.124
10	Partai Persatuan Pembangunan	520	520	520

4.1 Tabel Perolehan Suara Kecamatan Atu Lintang

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		
		C1	DAA1	DA1
3	PDI Perjuangan	951	951	951
10	Partai Persatuan Pembangunan	104	104	104

4.4 Tabel Perolehan Suara Kecamatan Jagong Jeget

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		
		C1	DAA1	DA1
3	PDI Perjuangan	1.489	1.489	1.489
10	Partai Persatuan Pembangunan	150	150	150

- 5 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menurut pihak terkait, dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

C. PETITUM

Berdasarkan Uraian-uraian alasan-alasan dan fakta-fakta yang diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabul Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara

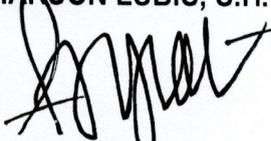
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2.
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2 yang benar adalah sebagai berikut :

No Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.654
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.733

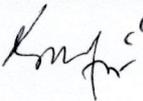
Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

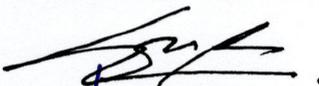
Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

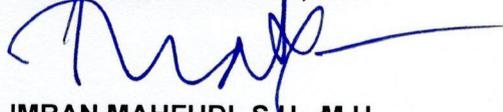

DIARSON LUBIS, S.H.

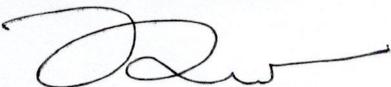

SIRRA PRAYUNA, S.H.

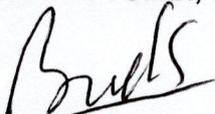

TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.


MAGDA WIDJAJANA, S.H.

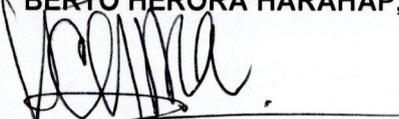

GUSTI RANDA MANIK, SH.


IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.


PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

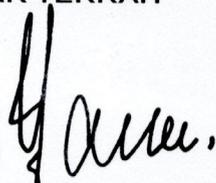

BUDI SETIAWAN, S.H.

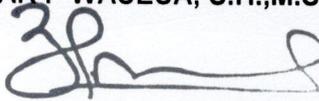

BERTO HERORA HARAHAP, S.H.

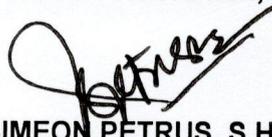

ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

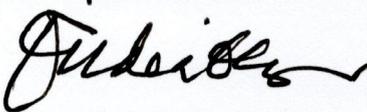
APRILSON PURBA, S.H., M.H.

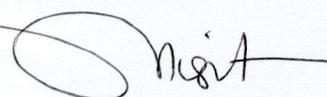

DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

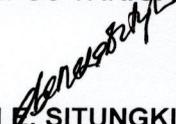

DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.

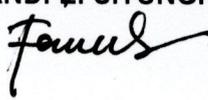

EDISON PANJAITAN, S.H.

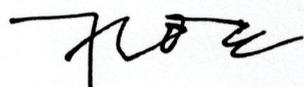

SIMEON PETRUS, S.H.

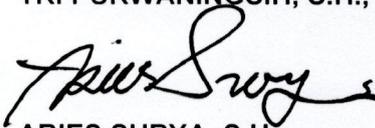

I WAYAN SUDIRTA, S.H.


M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

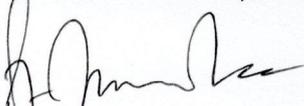

SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.

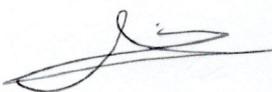

FERNANDY RUSDI, S.H.

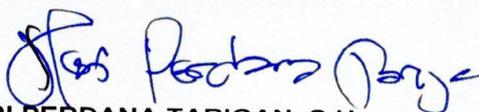

TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.

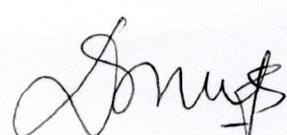

ARIES SURYA, S.H.


ALVON K. PALMA, S.H.


RIZKA, S.H.

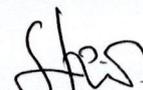

M. IBNU, S.H.

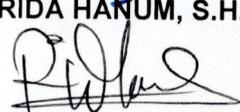

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

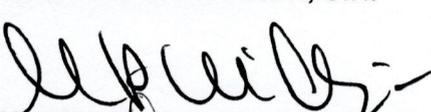

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

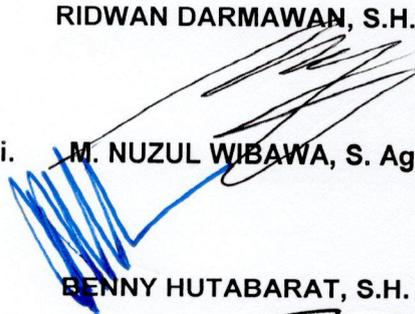

SAMUEL DAVID, S.H.

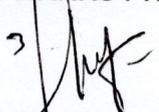

FARIDA HANUM, S.H.

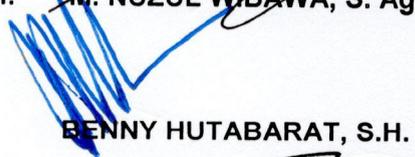

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

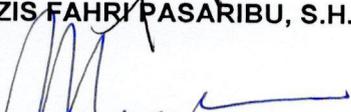

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

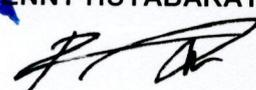

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

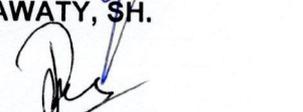

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

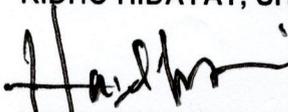

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

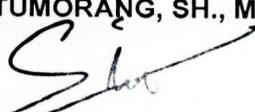

BENNY HUTABARAT, S.H.

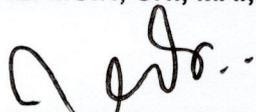

MEGAWATY, SH.


RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

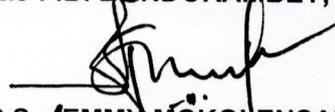

RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.

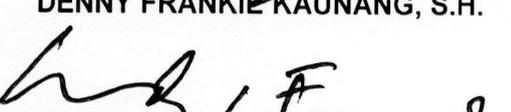

HARLI MUIN, SH., MA., MT.

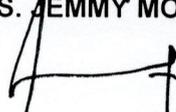

I MADE SUKA ARTHA, S.H.


JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

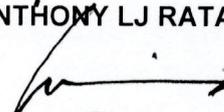

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

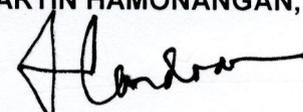

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

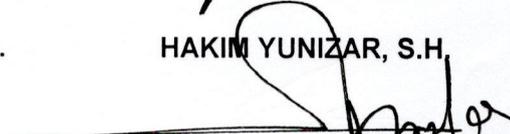

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

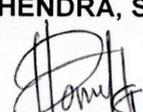

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

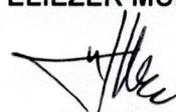

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

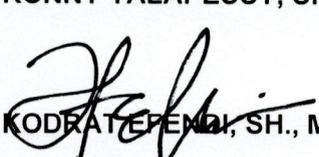

HAKIM YUNIZAR, S.H.

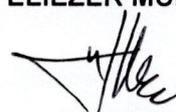

MAHENDRA, S.H., M.Hum.


ASTIRUDDIN PURBA, SH.


RONNY TALAPESSY, SH. MH.


ELIEZER MURAFER. SH.


KODRAT EFENDI, SH., MH.


YULIWATI, SH.